

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the difference between collection of BPHTB before and after No.28/2009 government's regulation in Bandung city, and effectivity of collection BPHTB for every year. Purposive sampling, effectivity ratio, and independent T-test are used in this research. The result show that BPHTB has the most effectivity that's equal to 166.07% in 2012. The independent t-test show that the difference of BPHTB collection are not different significantly, but the receipt of local income are increase after No.28/2009 government's regulation.

Keyword: effectivity, BPHTB, receipt of local income

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan dari penerimaan BPHTB sebelum dan sesudah diberlakukan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dan efektivitas penerimaan BPHTB setiap Tahun di kota bandung. Purposive sampling, rasio efektivitas, dan *independent t-test* digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPHTB mencapai efektivitas tertinggi sebesar 166.07% yaitu pada tahun 2012. Pada *independent t-test* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan dalam penerimaan BPHTB, tetapi penerimaan pendapatan daerah terjadi peningkatan setelah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dilaksanakan.

Kata-kata kunci: Efektivitas, BPHTB, Penerimaan Daerah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	 6
4.1 Landasan Teori	6
2.1.1. Teori Gaya Pikul	6
2.1.2. Pengertian Pajak	7
2.1.3. Fungsi Pajak	8
2.1.4. Jenis Pajak	9
2.1.5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12
2.1.5.1. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	13

2.1.5.2. Bukan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	16
2.1.5.3. Dasar Pengenaan	17
2.1.5.4. Tarif dan Perhitungan BPHTB	18
2.1.6. Pengalihan BPHTB menjadi Pendapatan Daerah	18
2.2. Kerangka Pemikiran	21
2.3. Pengembangan Hipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Objek Penelitian	25
3.2. Metode Penelitian	26
3.3. Definisi Operasional Variabel	27
3.4. Sampel Data	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data	29
3.6. Jenis Data	30
3.7. Analisis Data	30
3.7.1. Analisis Efektivitas	30
3.7.2. Analisis Pengujian Hipotesis	31
3.7.2.1. Uji Normalitas	31
3.7.2.2. <i>Independent t-test</i>	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat 1	33
4.1.1. Sejarah Singkat Kanwil DJP Jawa Barat 1	33
4.1.2. Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Barat 1 dan uraian tugas	34
4.1.3. Kegiatan Kanwil DJP Jawa Barat 1	38
4.2. Dinas Pelayanan Pajak	39
4.2.1. Sejarah Singkat Dinas Pelayanan Pajak	39
4.2.2. Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak, tugas pokok dan Fungsi ..	40
4.3. Perbedaan Pemungutan BPHTB sebelum dan Sesudah dilaksanakan	
Undang-Undang No.28 Tahun 2009	42

4.4. Perbandingan Penerimaan Daerah dari BPHTB sebelum dan sesudah Diberlakukan Undang-Undang No.28 Tahun 2009	44
4.5. Efektivitas BPHTB di Kota Bandung	46
4.5.1 Efektivitas BPHTB sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	46
4.5.2 Efektivitas BPHTB Sesudah diberlakukan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	48
4.6. Deskriptif Data Penelitian	49
4.7. Uji Perbandingan	50
4.7.1 Perbandingan efektivitas BPHTB sebelum dan sesudah Diberlakukanya Undang-Undang No.28 tahun 2009	50
4.8. Pembahasan Perbedaan Sebelum dan Sesudah dilaksanakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Pemungutan BPHTB	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	60
CURRICULUM VITAE.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1 Kerangka Pemikiran	22
Gambar 2.1 Skema bagi hasil BPHTB sebelum desentralisasi	23
Gambar 2.2 Skema Pembagian Sumber-sumber Keuangan Pendapatan Daerah Sebelum Desentralisasi dan Sesudah Desentralisasi	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Penyiapan Perda BPHTB	3
Tabel 2.1 Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No. 34/2000 dengan Undang-undang No. 28/2009	19
Tabel 2.2 Perbandingan BPHTB pada Undang-Undang BPHTB dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	27
Tabel 4.1 Perbandingan BPHTB pada Undang-Undang BPHTB dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	42
Tabel 4.2 Penerimaan Daerah dari sektor BPHTB	44
Tabel 4.3 Efektivitas BPHTB terhadap Target	47
Tabel 4.4 Efektivitas BPHTB terhadap Target	48
Tabel 4.5 Descriptive Statistic	50
Tabel 4.6 Uji Normalitas Data Efektivitas BPHTB sebelum dan Sesudah Diberlakukan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)	51
Tabel 4.7 Uji Beda Rata-rata Efektivitas BPHTB sebelum dan sesudah diberlakukan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	53

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
GRAFIK 1 Penerimaan Dari Sektor BPHTB	45
GRAFIK 2 Efektivitas Penerimaan BPHTB terhadap Target	47
GRAFIK 3 Efektivitas Penerimaan BPHTB terhadap Target	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1	60
LAMPIRAN B Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak	61
LAMPIRAN C <i>Output</i> SPSS	62